

Ironi Kebijakan Elpiji

Oleh: Wahyudi Kumorotomo

PEMERINTAH semakin tidak peduli pada rakyat? Tentu semua petinggi akan tersinggung dengan pernyataan ini. Tetapi berita terbaru tentang kebijakan yang diambil di bidang energi tampaknya mengesankan hal ini. Ketika harga minyak di pasar dunia mulai turun, tindakan yang diambil Pemerintah Malaysia adalah menurunkan harga bahan bakar di dalam negeri. Tetapi yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Belum lega sesak napas karena kenaikan BBM beberapa bulan lalu, kini harga elpiji dinaikkan drastis oleh Pertamina.

Harga jual elpiji tabung 12 kg naik lagi sebesar 9,5 persen setelah sebulan sebelumnya melonjak sebesar 23,5 persen. Perbedaan harga antara tabung komersial dan tabung subsidi kini cukup signifikan. Harga tabung 12 kg secara resmi sebesar Rp 5.750 perkilogram sedangkan harga tabung 3 kg masih tetap Rp 4.250 perkilogram. Itulah sebabnya kini orang beramai-ramai memburu elpiji tabung 3 kg dan menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan program konversi minyak ke gas elpiji. Imbauan pemerintah agar orang tidak memburu tabung 3 kg yang merupakan program subsidi tampaknya akan sulit terlaksana. Rumah tangga pengguna elpiji yang diimbau untuk tidak menggunakan pertimbangan ekonomi saja tentu sulit menerima karena toh Pertamina juga menggunakan logika ekonomi pasar. Situasi serba sulit dihadapi rakyat kelas bawah. Minyak tanah mulai langka karena program konversi ke elpiji, tetapi mencari elpiji bersubsidi juga semakin sulit karena orang kini memburunya.

Satu hal yang jelas ialah bahwa kenaikan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh Pertamina ini akan mengancam keberhasilan program konversi minyak tanah ke elpiji. Meskipun dalam pelaksanaannya menuai berbagai kritik, sebenarnya program konversi sudah mulai kelihatan hasilnya. Sebagian pedagang kecil sudah mulai bisa menerima elpiji sebagai alternatif. Jika program ini dilaksanakan secara konsisten, sebenarnya cukup besar potensinya untuk menghemat dana APBN yang terus digerogeti subsidi BBM.

Dari berbagai perspektif, kebijakan pemerintah untuk melakukan konversi pemakaian bahan bakar dari minyak tanah ke gas elpiji sangat logis. Harga minyak mentah internasional masih sangat tinggi, meskipun belakangan ini sudah sedikit turun. Jika harga minyak tanah dalam negeri hendak dipertahankan, pemerintah harus mengeluarkan dana APBN yang begitu besar untuk mensubsidi. Sementara itu cadangan minyak bumi di Indonesia sekarang ini sudah semakin menipis. Sejak tahun 2003, Indonesia sebenarnya sudah menjadi negara net importer bahan-bakar minyak. Di lain pihak, potensi cadangan elpiji (LPG) di perut bumi Indonesia masih melimpah atau setidaknya jauh lebih besar jika dibanding cadangan minyak bumi yang ada. Kecuali itu, penggunaan elpiji sebagai bahan bakar relatif lebih bersih karena polusinya lebih ringan jika dibanding minyak tanah.

Pada awalnya, kebijakan konversi energi memang sangat sulit dilaksanakan. Masalah pokok yang dihadapi dalam tahap implementasi ialah bahwa tidak mudah bagi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk beralih

ke elpiji. Meskipun tabungnya diberikan gratis dan berukuran kecil, tetap saja tidak mungkin membeli eceran sebagaimana minyak tanah. Elpiji harus dibeli satu tabung 3 kg dengan harga di agen yang bisa bervariasi. Di lapangan juga terungkap bahwa banyak kompor gas yang rusak sehingga tabung gasnya bocor. Dalam hal ini para agen pemasok tabung dan kompor gas sering kali tidak mau bertanggung jawab untuk menggantikannya dengan yang baru karena jelas akan mengurangi margin keuntungan mereka. Di tengah berbagai kesulitan semacam itu, sebenarnya sudah ada beberapa titik terang dalam kebijakan konversi bahan bakar yang mulai diterapkan tahun 2007 ini. Meskipun baru diterapkan terbatas di kota-kota besar yang infrastrukturnya sudah mapan, konversi sudah mulai berjalan. Masyarakat kita pelan-pelan bisa 'dipaksa' adaptif untuk menggunakan elpiji sebagai bahan bakar rumah tangga alternatif. Di DKI Jakarta, program konversi dari minyak tanah ke elpiji sudah tercapai sejak bulan Mei lalu. Daerah lain seperti Surabaya, Semarang, Denpasar atau Yogya mungkin akan menyusul. Lalu pertanyaannya, mengapa sekarang seolah-olah pemerintah berbalik arah dengan membiarkan Pertamina bertindak sendiri menaikkan harga elpiji? Mengapa pemerintah seperti kurang tanggap dengan semakin banyaknya orang kembali ke minyak tanah dengan konsekuensi beban subsidi APBN yang semakin besar?

Ironi dari kebijakan elpiji ini menunjukkan sekali lagi bahwa pemerintah sering kehilangan kendali terhadap institusi yang semestinya melindungi kepentingan publik. Argumentasi sebagian pejabat bahwa kenaikan harga tabung 12 kg ini sepenuhnya merupakan wilayah bisnis Pertamina sedangkan pemerintah melalui mekanisme APBN hanya mensubsidi pengguna tabung 3 kg menunjukkan bahwa pemerintah sudah semakin kehilangan fungsinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan mengenai energi juga mengesankan bahwa, menghadapi Pertamina dan berbagai politisi yang memerah BUMN selama ini, pemerintah cenderung mencari jalan mudah. Alih-alih memberantas KKN dan inefisiensi di tubuh Pertamina, pemerintah justru mengorbankan rakyat yang sudah terjepit.

Dalam situasi menjelang bulan Puasa dan menyambut Lebaran tetapi semuanya justru serba sulit, tentu rakyat akan mencatat rentetan kebijakan ini di benak mereka. Sulit dibayangkan apakah rakyat masih bisa percaya dengan garis kebijakan yang diambil oleh pemerintah apabila persoalan seperti ini dibiarkan berlarut-larut. Sebagian orang yang masih percaya akan perubahan melalui proses pemilihan umum mungkin akan mengingatnya ketika memasuki bilik suara pada Pemilu 2009. (Penulis adalah dosen Jurusan AN Fisipol dan MAP UGM)-z